



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUTOPO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 763880

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/92 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
2. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/200 m2 di KAB / KOTA DEMAK, WARISAN Rp. 550.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	205.000.000
1. MOTOR, HONDA GL15A1RR M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1,5 IDSI MT Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD/MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
4. MOTOR, HONDA SCOOPY F1CO2N46LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
5. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	159.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	574.954.165



F. HARTA LAINNYA

Rp. 75.000.000

Sub Total

Rp. 2.813.954.165

III. HUTANG

Rp. 520.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.293.954.165

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.